

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses penting yang berlangsung secara bertahap dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi dan pendapatan, juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan hasil pembangunan. Menurut Todaro dan Smith (2015), menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang mencakup perubahan struktur sosial, kelembagaan, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan antarwilayah.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya proses tersebut kerap kali tidak menghasilkan dampak yang seimbang bagi setiap kelompok maupun wilayah. Perbedaan kondisi geografis, sumber daya, struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap berbagai fasilitas pembangunan dapat menyebabkan kemampuan setiap wilayah dalam menghasilkan pendapatan menjadi berbeda. Apabila aktivitas

ekonomi lebih terpusat pada kelompok atau kawasan tertentu, sementara daerah lain menghadapi keterbatasan akses dan peluang ekonomi, maka kondisi tersebut berpotensi memicu terjadinya kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan ekonomi karena ketimpangan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang hingga kini masih belum terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan yang tersebar di berbagai wilayah. Ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan tren menurun dari 0,410 pada tahun 2015 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, tingkat ketimpangan tersebut masih berada pada kategori sedang sehingga pemerataan pendapatan tetap menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbedaan karakteristik ekonomi antardaerah turut memengaruhi kondisi tersebut, karena daerah yang memiliki pusat kegiatan perdagangan, industri, dan jasa cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer atau pertanian tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional masih menghadapi persoalan pemerataan baik antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah.

Permasalahan ketimpangan pendapatan yang sama juga turut mewarnai dinamika pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Selama periode 2015–2025, ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat yang diukur melalui Indeks Gini menunjukkan kecenderungan membaik dari 0,319 pada tahun 2015 menjadi 0,280

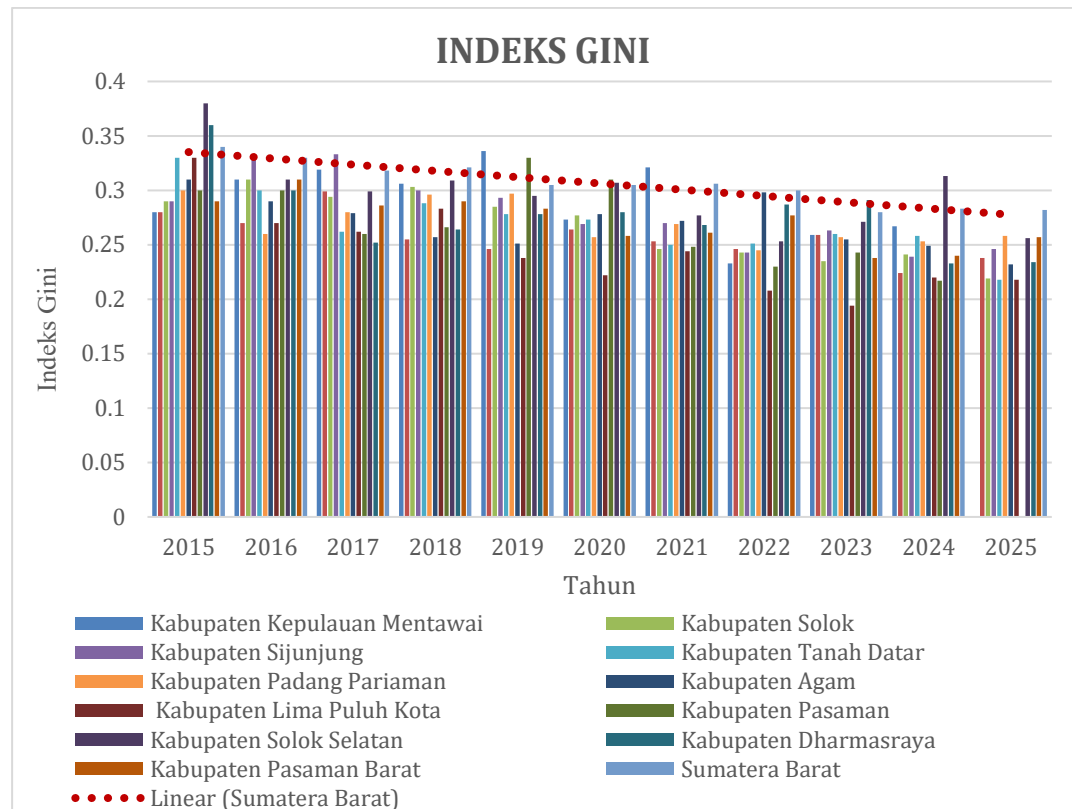
pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, tingkat ketimpangan tersebut masih berada dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, tingkat ketimpangan Sumatera Barat relatif lebih rendah, namun kondisi tersebut tidak berarti bahwa persoalan ketimpangan telah sepenuhnya terselesaikan. Perbedaan tingkat ketimpangan masih ditemukan pada kabupaten-kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Barat sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik wilayah yang beragam, baik dari sisi geografis, sosial, maupun struktur ekonominya. Wilayah Sumatera Barat terdiri atas daerah pegunungan, pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, hingga wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan setiap kabupaten memiliki potensi dan karakteristik ekonomi yang berbeda. Sebagian wilayah memiliki aktivitas ekonomi yang kuat pada sektor pertanian dan perkebunan, sementara wilayah lainnya berkembang melalui perdagangan, pariwisata, perikanan, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbedaan potensi tersebut kemudian tercermin dalam perbedaan tingkat aktivitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dan kesempatan kerja di masing-masing kabupaten.

Meskipun terdapat perbedaan potensi ekonomi antarwilayah, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa setiap kabupaten berdiri sendiri dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Antar kabupaten memiliki keterkaitan melalui kegiatan produksi, distribusi, perdagangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang dan jasa. Wilayah yang memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perkebunan, atau

perikanan dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan bagi wilayah lain, sementara wilayah yang berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, atau kegiatan ekonomi lainnya dapat menjadi pasar bagi produk dan jasa dari wilayah sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi suatu kabupaten dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi kabupaten lainnya. Keterkaitan tersebut menjadikan kondisi pembangunan di masing-masing wilayah tidak sepenuhnya terpisah, tetapi berada dalam suatu hubungan ekonomi regional di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat memiliki keterkaitan ekonomi yang dimana setiap kabupaten tidak memiliki kapasitas pembangunan yang sama dalam memanfaatkan potensi dan hubungan ekonomi tersebut. Perbedaan akses terhadap infrastruktur, kualitas pendidikan, kesempatan kerja, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan pembangunan dapat menyebabkan kemampuan masing-masing wilayah dalam mengembangkan kegiatan ekonominya menjadi berbeda. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor pendukung kegiatan ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sedangkan wilayah yang menghadapi keterbatasan akses dapat mengalami hambatan dalam mengoptimalkan potensi ekonominya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang saling terhubung antar kabupaten belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan pada akhirnya berpotensi mempertahankan ketimpangan pendapatan antar wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Gambar 1. 1 Indeks Gini Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025

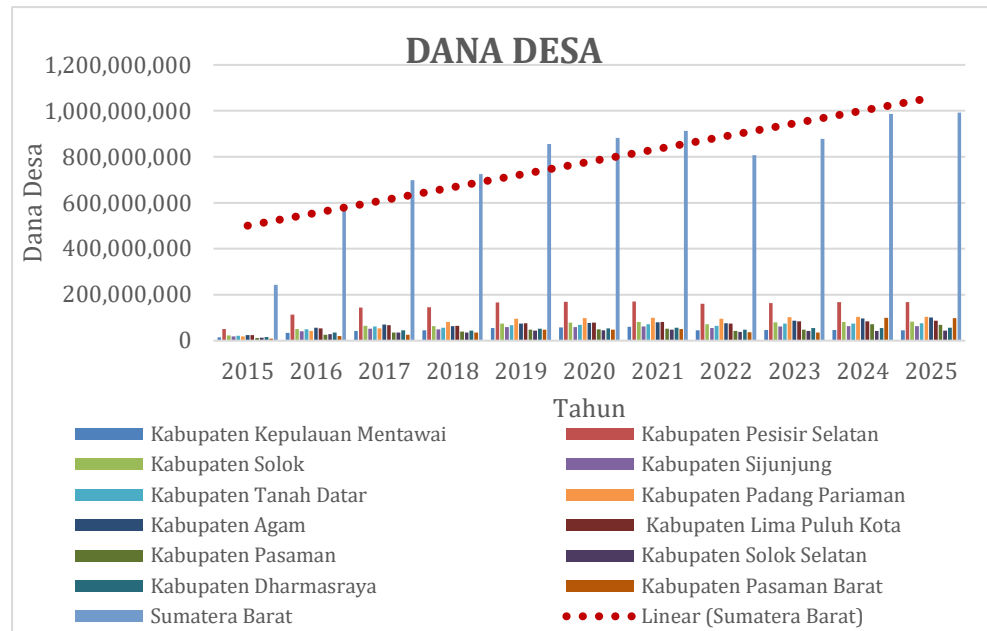
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten-kabupaten Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan variasi dan fluktuasi sepanjang periode 2015–2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemerataan pembangunan belum berlangsung secara seragam pada seluruh wilayah. Perbedaan tingkat ketimpangan antar kabupaten juga menunjukkan adanya perbedaan kapasitas wilayah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, meskipun secara agregat ketimpangan di Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan menurun, variasi kondisi antar kabupaten tetap

perlu dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat terjadinya transformasi struktural dari sektor pertanian tradisional menuju sektor modern. Namun, seiring dengan berkembangnya pembangunan ekonomi dan semakin meratanya manfaat pembangunan, ketimpangan tersebut dapat menurun. Sementara itu, Todaro dan Smith (2015), menjelaskan bahwa ketimpangan di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kepemilikan aset, serta ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui berbagai faktor yang menentukan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antar daerah melalui kebijakan penyaluran Dana Desa mulai diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa merupakan bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat desa secara lebih luas. Melalui kebijakan ini, Dana Desa berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkecil ketimpangan antardaerah. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas aparatur desa, serta

keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, pengaruh Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan pendapatan masih memerlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris.



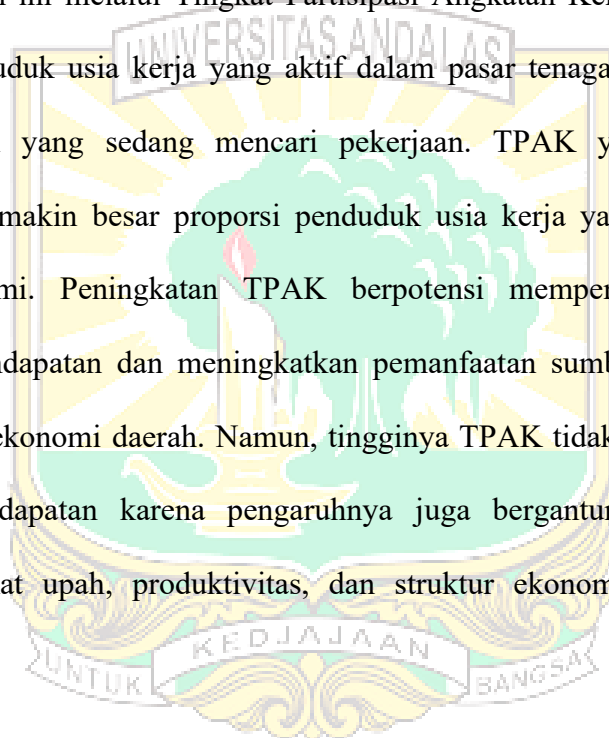
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

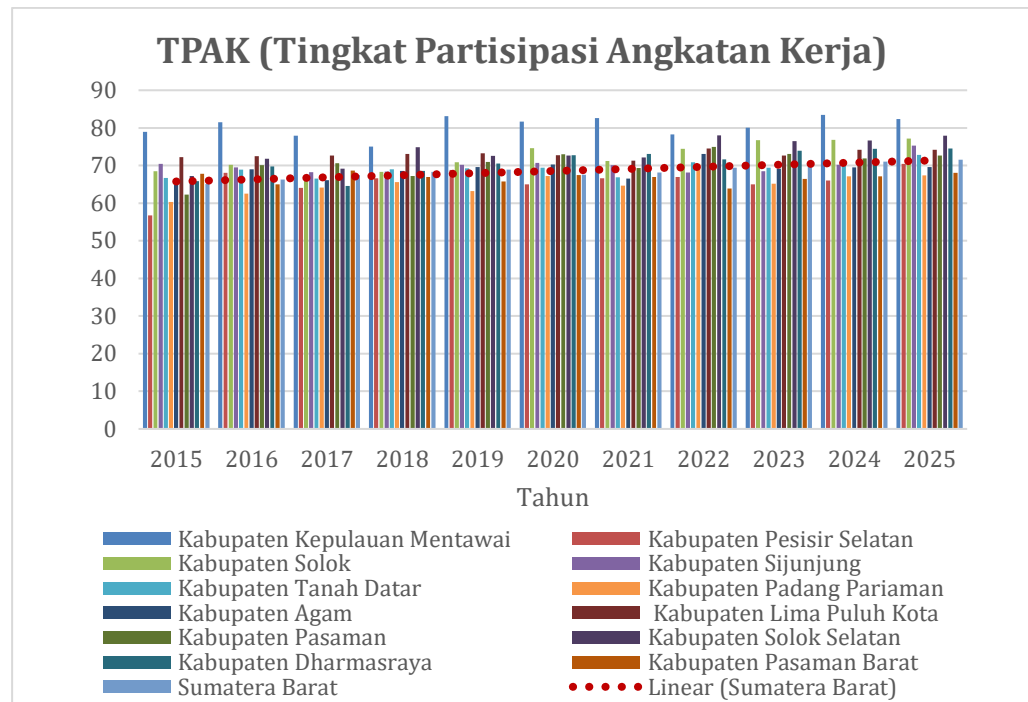
Gambar 1. 2 Dana Desa Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025

Data pada Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan Dana Desa mengalami fluktuasi sepanjang periode pengamatan. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada awal implementasi program, yakni pada tahun 2015 hingga 2016, yang kemudian cenderung melambat pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan alokasi yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, kemungkinan sebagai dampak dari penyesuaian anggaran pascapandemi COVID-19. Kabupaten Pesisir Selatan secara konsisten menjadi penerima Dana Desa terbesar di Sumatera Barat selama periode pengamatan, hal ini terutama disebabkan oleh jumlah nagari yang lebih banyak

dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi tersebut. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pedesaan Indonesia periode 2015-2022 (Salsabila dan Arcana, 2024).

Selain adanya fiskal pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan. Dalam penelitian ini melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan TPAK berpotensi memperluas kesempatan memperoleh pendapatan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan ekonomi daerah. Namun, tingginya TPAK tidak selalu menjamin pemerataan pendapatan karena pengaruhnya juga bergantung pada kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas, dan struktur ekonomi masing-masing wilayah.



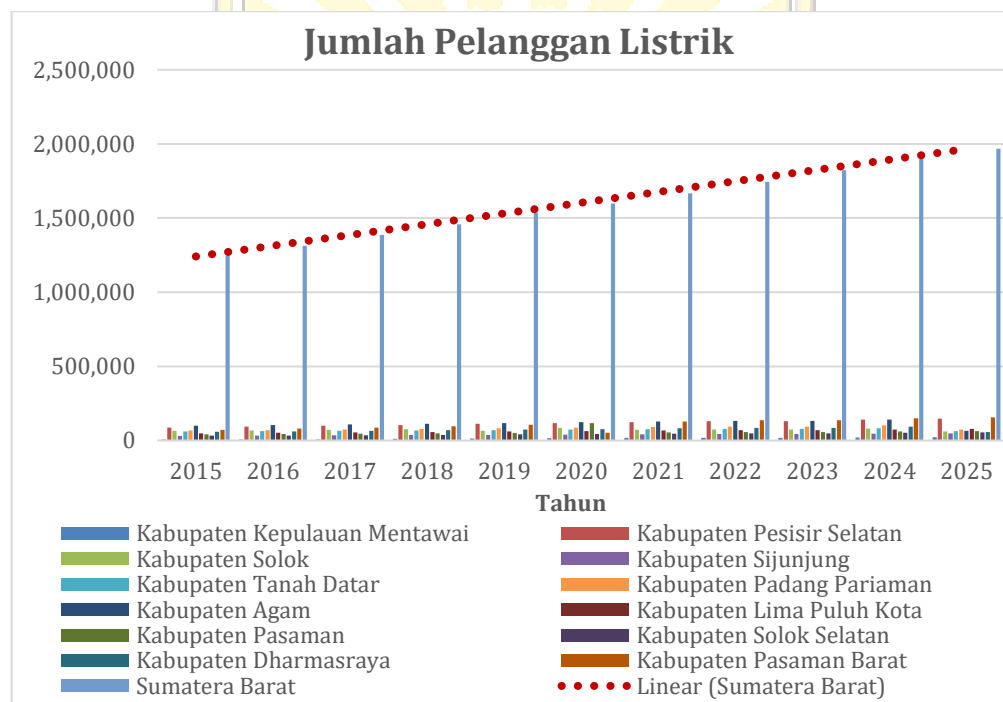


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025

Data TPAK Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan dari 65,12% pada 2015 menjadi 71,58% pada 2025, dengan kenaikan kumulatif sebesar 6,46 poin persentase selama satu dekade. Penurunan sempat terjadi pada 2020 sebesar 1,35 poin akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian pekerja keluar dari angkatan kerja. Pemulihan berlangsung sejak 2021 seiring membaiknya aktivitas ekonomi daerah. Nilasari dan Amelia (2022), menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi kerja berkontribusi pada pemerataan pendapatan di suatu daerah.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah infrastruktur energi, khususnya akses terhadap listrik. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kegiatan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Ketersediaan listrik memungkinkan berkembangnya usaha kecil, industri rumah tangga, teknologi informasi, dan layanan pendidikan. Kementerian ESDM (2024), melaporkan bahwa rasio elektrifikasi nasional meningkat menjadi 99,78% pada 2023, namun masih terdapat 185.662 rumah tangga dan 140 desa yang belum berlistrik, terutama di wilayah Papua.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

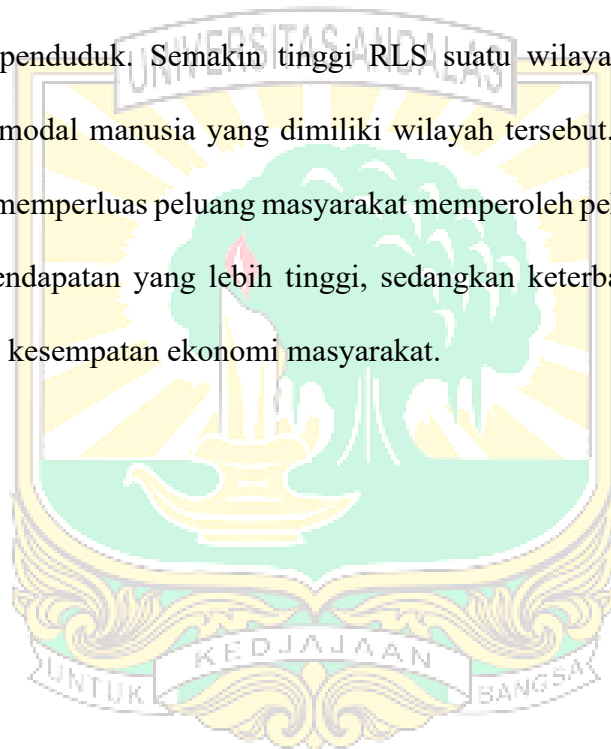
Gambar 1. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025

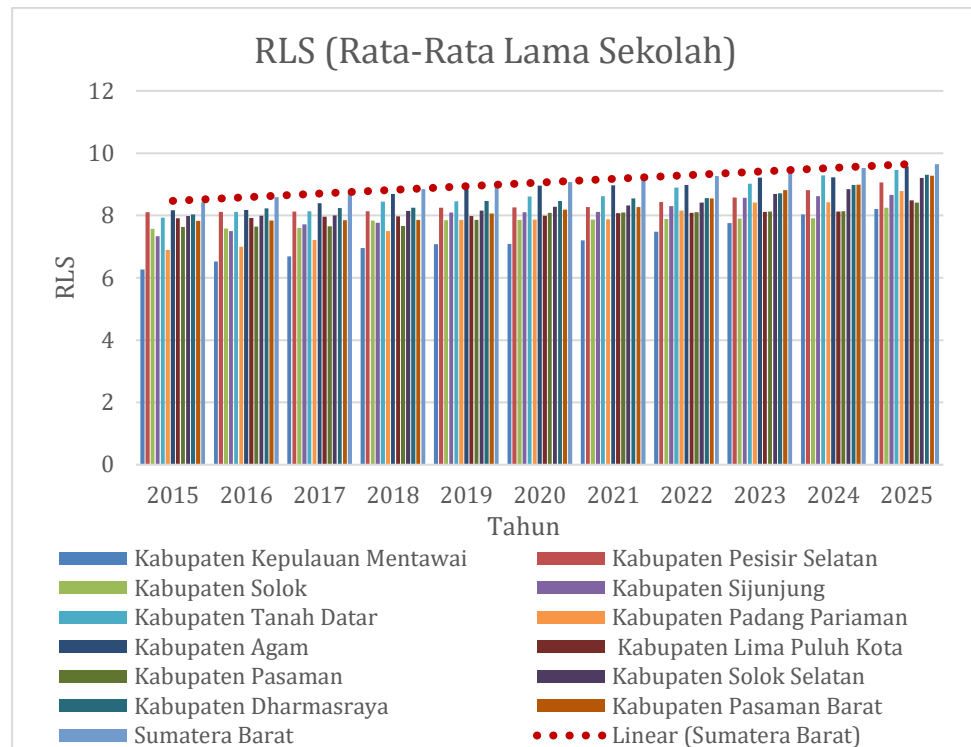
Data pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik pada masing-masing kabupaten di Provinsi Sumatera Barat secara umum mengalami

peningkatan selama periode 2015–2025. Namun, peningkatan tersebut tidak berlangsung secara seragam antar wilayah. Beberapa kabupaten memiliki jumlah pelanggan listrik yang relatif lebih tinggi, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan jumlah pelanggan yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Sumatera Barat yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi geografis yang berbeda dapat mempengaruhi pembangunan jaringan listrik dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap energi. Ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur energi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan masing-masing wilayah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, karena listrik diperlukan untuk mendukung kegiatan rumah tangga, usaha, perdagangan, industri, serta pelayanan publik.

Hubungan antara ketersediaan listrik dan perkembangan ekonomi juga didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian mengenai perkembangan listrik dan rasio elektrifikasi menunjukkan bahwa peningkatan akses listrik berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah. Ketersediaan infrastruktur energi diduga memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan, tetapi arah dan besarnya pengaruh tersebut perlu dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, infrastruktur energi menjadi salah satu faktor yang dianalisis dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah perbedaan ketersediaan listrik antarkabupaten berkaitan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat.

Selain faktor fiskal, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur energi, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Pendidikan berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam memasuki pasar kerja. Dalam penelitian ini, pendidikan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk. Semakin tinggi RLS suatu wilayah, semakin besar potensi kualitas modal manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Pendidikan yang lebih baik dapat memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan keterbatasan pendidikan dapat membatasi kesempatan ekonomi masyarakat.





Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2015-2025

Gambar 1. 5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025

Data RLS Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 8,42 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,65 tahun pada tahun 2025 (proyeksi). Kenaikan sebesar 1,23 tahun selama satu dekade ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Nilai RLS sebesar 9,65 tahun setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 9 atau 10, yang mencerminkan bahwa rata-rata penduduk dewasa di Sumatera Barat telah menyelesaikan pendidikan dasar dan mulai memasuki jenjang pendidikan menengah. Salsabila dan Arcana (2024), membuktikan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Hubungan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu memperoleh keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Pada tingkat wilayah, perbedaan capaian pendidikan dapat menghasilkan perbedaan kualitas tenaga kerja dan produktivitas antardaerah. Apabila suatu wilayah memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, wilayah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dapat menghambat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang tersedia. Oleh karena itu, perbedaan capaian pendidikan antarwilayah dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkaitan dengan terbentuknya ketimpangan pendapatan antar kabupaten.

Hubungan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan juga didukung oleh bukti empiris. World Bank (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Salsabila dan Arcana (2024) menemukan bahwa Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di perdesaan Indonesia periode 2015–2022. Selain itu, Pradina et al. (2025) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan Arisyi (2025) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia

yang di dalamnya mencakup dimensi pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini memberikan landasan empiris yang kuat. Salsabila dan Arcana (2024), membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di perdesaan Indonesia periode 2015–2022, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan berkontribusi pada pemerataan distribusi pendapatan. Pradina et al. (2025), dalam penelitiannya di Bali juga mengkonfirmasi bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan seluruh variabel ekonomi yang diuji terbukti signifikan secara simultan. Berbagai temuan empiris tersebut memperkuat urgensi penelitian ini dalam menganalisis pengaruh Dana Desa, partisipasi masyarakat, infrastruktur energi, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Sumatera Barat secara lebih komprehensif dan terpadu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Infrastruktur Energi yang diproksikan dengan Jumlah Pelanggan Listrik, serta Pendidikan yang diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat periode 2015–2025. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat variasi tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Selain itu, penelitian mengenai ketimpangan

pendapatan umumnya lebih banyak meneliti pada faktor ekonomi makro dan pendidikan, sedangkan variabel TPAK dan Infrastruktur Energi masih relatif terbatas untuk dikaji, khususnya pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel TPAK dan Infrastruktur Energi sebagai faktor yang diduga turut memengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025?
2. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025?
3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Energi (jumlah pelanggan listrik) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025?

4. Bagaimana pengaruh Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025?
5. Bagaimana pengaruh Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Infrastruktur Energi, dan Pendidikan secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025.
2. Menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025.
3. Menganalisis pengaruh Infrastruktur Energi (jumlah pelanggan listrik) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025.
4. Menganalisis pengaruh Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025.
5. Menganalisis pengaruh Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Infrastruktur Energi, dan Pendidikan secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami determinan ketimpangan pendapatan regional di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah mengenai efektivitas kebijakan Dana Desa dalam konteks pemerataan ekonomi di daerah yang masih mempertahankan sistem pemerintahan tradisional, seperti nagari di Sumatera Barat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji persoalan ketimpangan pendapatan dengan pendekatan yang berbeda atau di wilayah lain di Indonesia.
4. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menguji relevansi teori-teori ekonomi pembangunan, seperti Teori Tahapan Rostow dan Hipotesis Kuznets, dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Pembuat Kebijakan / Pemerintah Daerah

Temuan studi ini ditujukan sebagai rujukan korektif dalam mengukur efektivitas penyaluran alokasi dana pedesaan, sekaligus bahan pertimbangan bagi penyusunan arah pembangunan daerah agar lebih ampuh memangkas disparitas ekonomi antarkabupaten di Sumatera Barat.

2. Otoritas Nagari

Kajian ini dirancang untuk memberikan sudut pandang taktis bagi aparat nagari dalam mengelola anggaran desa secara produktif, sehingga mampu mendorong taraf hidup warga dan menipiskan jurang kesejahteraan di tingkat lokal.

3. Warga Masyarakat

Output riset ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan publik yang lebih masif dalam roda perekonomian dan agenda pembangunan kawasan, guna mempercepat terciptanya pemerataan hasil ekonomi yang proporsional.

4. Kalangan Akademisi dan Peneliti

Riset ini diproyeksikan sebagai acuan data empiris serta referensi kepustakaan bagi studi-studi mendatang yang berfokus pada dinamika pembangunan wilayah, strategi fiskal, serta penanganan kesenjangan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

a. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat yang meliputi 12 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Tujuh kota yang ada di Sumatera Barat tidak diikutsertakan dalam analisis karena penelitian ini berfokus pada wilayah kabupaten yang menjadi penerima langsung Dana Desa.

b. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian mencakup rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2025 (11 tahun), terhitung sejak mulai diimplementasikannya kebijakan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Ruang Lingkup Variabel

- 1) Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini kabupaten.
- 2) Variabel Independen: Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Pelanggan Listrik, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

d. Ruang Lingkup Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Alur penyusunan tugas akhir ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pembuka ini memperjelas gambaran umum masalah terkait dinamika disparitas kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat serta variabel-variabel penentunya. Di dalamnya juga memuat identifikasi masalah, sasaran

kajian, signifikansi riset bagi ranah akademis dan aplikatif, batasan pembahasan, hingga urutan penyusunan laporan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan acuan konsep yang selaras dengan topik utama. Selain itu, bagian ini memuat ulasan riset-riset terdahulu, skema alur berpikir teoritis, serta dugaan awal (hipotesis) yang hendak diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini mendeskripsikan pendekatan analisis yang diterapkan, mencakup variasi data beserta asal-usulnya, penentuan objek kajian, batasan konsep operasional tiap variabel, prosedur pengumpulan data, hingga metode pemrosesan analisis memanfaatkan teknik regresi data panel.

BAB IV ANALISIS DATA DAN DISKUSI

Bagian ini menjabarkan temuan statistik kuantitatif seputar keterkaitan IPM, penerima manfaat bansos pangan, dan keterjangkauan fasilitas sanitasi terhadap tingkat kemiskinan, disertai elaborasi mendalam atas hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP DAN REKOMENDASI

Bagian pemungkas ini memuat rangkuman inti dari temuan studi beserta masukan konkrit yang ditujukan untuk pengembangan riset selanjutnya maupun pertimbangan pengambil kebijakan lokal.